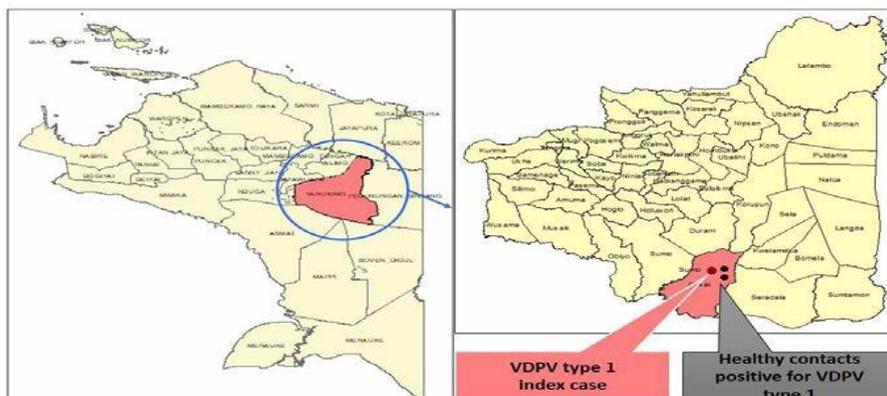


Laporan Situasi KLB cVDPV1 di Indonesia #16

18 Oktober 2019

Hanya untuk sirkulasi internal

Kasus cVDPV1 di Provinsi Papua, Indonesia, 2018-2019



Sorotan Mingguan

- Tidak ada kasus VDPV baru yang dilaporkan minggu ini-epi no 41.
- Dengan dukungan WHO, pelatihan surveilans AFP untuk memperkuat kapasitas petugas surveilans di tingkat Provinsi telah dilaksanakan oleh Kemenkes pada tanggal 7-11 Oktober 2019 di Bekasi. Total peserta adalah 51 orang dari seluruh (26 provinsi) dengan narasumber dan fasilitator dari pejabat senior Kemenkes, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), National Institute on Health and Research Development (NIHRD) dan WHO Indonesia. Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan utama dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas surveilans AFP melalui peningkatan koordinasi di tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas.
- Operasi khusus di Yahukimo telah dilanjutkan kembali setelah ditunda dua bulan akibat persoalan cuaca dan keamanan. Para staf DKP/DKK/Puskesmas, dengan dukungan aviasi Advent, telah melakukan vaksinasi di 7 kecamatan di Yahukimo sejak hari Minggu, 13 Oktober 2019. Pada saat yang sama, UNICEF mencari cara untuk menyewa helikopter guna mendukung sejumlah area teridentifikasi lain di Yahukimo yang tidak dapat diakses oleh pesawat.
- Guna meneruskan dukungan pelaksanaan Sub PIN Polio dan untuk menjangkau anak-anak yang belum tervaksinasi, UNICEF melalui GAPAI dan YP2KP telah merekrut 22 petugas lapangan untuk ditempatkan di 12 daerah dataran rendah di Papua sampai akhir 2019. Para petugas lapangan akan bertanggung jawab untuk membantu daerah masing-masing mencapai cakupan 95%, mengembangkan strategi social mobilisasi, meningkatkan keefektifan vaksin dan manajemen rantai dingin serta melaksanakan RCA. Dua pelatihan untuk mitra telah dilaksanakan pada 2-4 Oktober 2019 dan 10-11 Oktober 2019.
- Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan surveilans AFP/cakupan bOPV dan IPV di area yang berbatasan dengan Filipina.
- Kegiatan antisipatif sehubungan dengan potensi transmisi cVDPV2 dari Filipina, WHO melakukan redistribusi stafnya ke sejumlah provinsi yang berbatasan dengan Filipina: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara untuk memperkuat imunisasi rutin dan surveilans AFP.
- Kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat tetap menjadi persoalan yang menghambat kegiatan respon KLB.
- Papua memiliki NP AFP rate tahunan sebesar 4.28 dengan spesimen adekuat sebesar 51.1% sedangkan Papua Barat memiliki NP AFP rate tahunan sebesar 7.11 dengan spesimen adekuat sebesar 56.3%.
- Penilaian kembali terhadap surveilans lingkungan (ES) telah dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas.

Ringkasan

Kasus cVDPV1 baru minggu ini: 0
Total kasus cVDPV1 :1
Total anak sehat positif dengan VDPV1 : 2
Grade KLB : 1
Deteksi Terakhir: 13 Feb 2019

Detail Kasus

Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia: 31 Bulan
Mulai Kelumpuhan: 27 Nov 2018
Status Vaksinasi: 0 dosis

Area Terinfeksi

Kecamatan Dekai
Kabupaten Yahukimo
Provinsi Papua

Respon KLB

Dimana: Provinsi Papua dan Papua Barat
Siapa: Seluruh anak usia 0 sampai kurang dari 15 tahun
Target: 1.26 juta anak
Jenis Vaksin: bOPV

Sub PIN

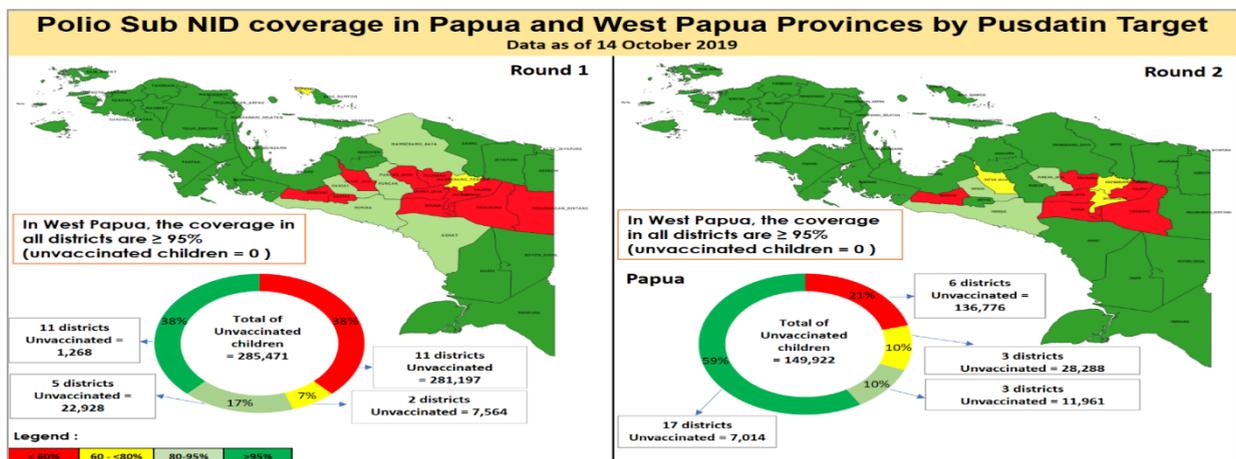
- Indonesia telah mengadopsi pendekatan untuk menjangkau semua anak yang disesuaikan dengan 3 zona risiko geografis dan sosial : (1) Papua Barat (2) dataran rendah Papua yang mudah diakses, dan (3) dataran tinggi Papua yang sulit diakses
- Wisatawan yang mengunjungi Papua selama lebih dari empat minggu, baik orang Indonesia maupun orang asing harus divaksinasi di titik masuk sampai wabah dinyatakan telah mampu diatasi. Vaksinasi dilakukan di 5 titik transit, termasuk bandara dan pelabuhan utama di provinsi Papua. Pihak berwenang di Pelabuhan Papua Barat juga telah memulai vaksinasi transit di pelabuhan dan bandara di sejumlah kabupaten termasuk Sorong dan Manokwari.
- Vaksinasi perbatasan terus dilangsungkan di 5 kabupaten (Kota Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Merauke) di perlintasan perbatasan resmi antara Provinsi Papua dan Papua Nugini.

Putaran 1

- Sub PIN putaran 1 yang menargetkan anak-anak berusia 0 hingga kurang dari 15 tahun dengan pemberian bivalent oral polio vaksin (bOPV) telah selesai dilaksanakan di Papua dan Papua Barat pada 28 April. Laporan terakhir, sebanyak 1.004.670 anak telah divaksinasi di putaran pertama dari 1.362.877 yang menjadi target, berdasarkan data Pusdatin atau target proyeksi nasional di kedua provinsi tersebut.
- Seluruh 13 kabupaten** di Papua Barat melaporkan pencapaian minimal 95% dari target populasi.
- Di Provinsi Papua, **11 dari 29** kota/kabupaten mencapai cakupan imunisasi sebesar **95%**. Sementara, cakupan di tiga kabupaten mencapai lebih dari 80%. Lima belas kabupaten dilaporkan memiliki cakupan kurang dari 80%, termasuk Kabupaten Yahukimo dengan cakupan yang dilaporkan mencapai 19%.
- Terdapat 218 rapid convenience assessment (RCA) yang telah selesai diimplementasikan setelah pelaksanaan putaran 1. Di Papua Barat, total 48 RCA telah dilakukan untuk memeriksa sebanyak 2,439 anak di semua kabupaten, perkiraan cakupan adalah 95%. Di Papua, 170 RCA dilakukan di **20/29** kabupaten dengan total 8,597 anak. Data menunjukkan capaian vaksinasi secara keseluruhan sebesar 91%, 90% di daerah dataran rendah dan 93% di daerah dataran tinggi. Empat dari 12 kabupaten dataran rendah (Asmat, Merauke, Kepulauan Yapen, Biak Numfor) dan empat dari 8 kabupaten dataran tinggi (Puncak, Puncak Jaya, Jayawijaya, Yahukimo) yang telah dilakukan RCA dengan capaian sebesar 95%.

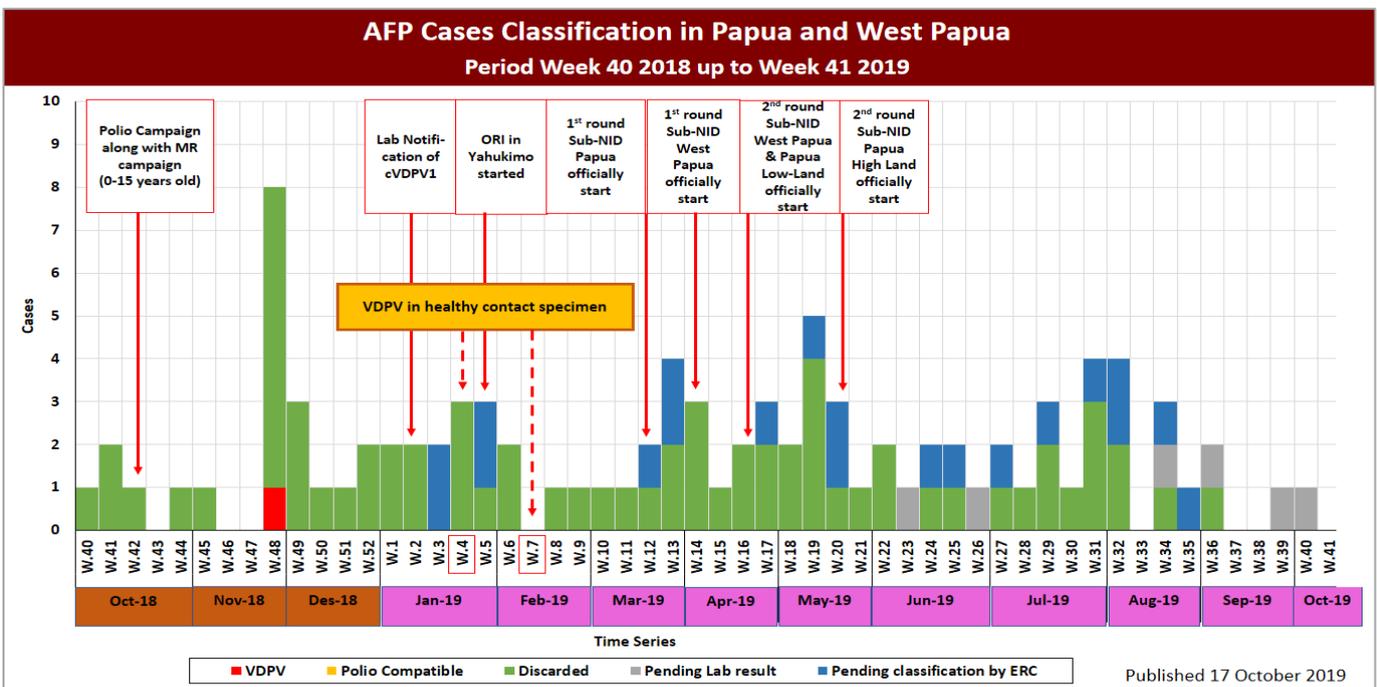
Putaran 2

- Sub PIN putaran 2 telah selesai di provinsi Papua Barat. Cakupan yang dilaporkan dari Papua Barat adalah **>100%**. **Seluruh 13 kabupaten** telah melaporkan cakupan tinggi yang seragam, yaitu **>95%**.
- Sub PIN putaran 2 di Papua diperpanjang sampai pertemuan peninjauan berikutnya pada akhir Oktober 2019. Sampai dengan 14 Oktober, cakupan yang dilaporkan di Papua adalah **84.67%** (menggunakan Pusdatin atau target proyeksi nasional). Cakupan menggunakan perkiraan populasi target lokal adalah **91.93%**. Dengan menggunakan perkiraan populasi target lokal, **24 (15 di dataran rendah, 9 di dataran tinggi)** dari 29 kabupaten telah melaporkan setidaknya **80%**. Dari **24 kabupaten** tersebut, **20 kabupaten** telah mencapai **lebih dari 95%**.
- Strategi khusus sedang dilaksanakan untuk mencapai 10-15% anak-anak target yang tersisa terutama di kabupaten dataran tinggi, antara lain melalui sweeping, mengintensifkan kepemimpinan politik, koordinasi dan kolaborasi antar kementerian.
- Sampai dengan 16 Oktober 2019, 45 RCA dengan menggunakan alat RCA yang dimodifikasi berhasil dicatat dari Provinsi Papua. Total terdapat 2,305 anak-anak berusia 0-15 tahun yang dinilai dan 84% dari mereka menerima 2 dosis OPV dalam 2 putaran.
- Provinsi Papua Barat telah melakukan total 58 RCA di **13** kabupaten setelah menyelesaikan vaksinasi putaran 2. Total terdapat 2,783 anak-anak berusia 0-15 tahun yang telah dinilai. Data menunjukkan bahwa **97.7%** anak-anak yang dinilai telah divaksinasi. Alasan utama anak-anak yang melewatkan vaksinasi di Papua Barat adalah sedang bepergian atau sakit. Di Papua, 87 RCA telah diselesaikan selama putaran 2 dengan **4** di kabupaten dataran tinggi dan **11** di kabupaten dataran rendah. Sebanyak 4,630 anak telah dinilai. Data menunjukkan bahwa **86.4%** anak-anak yang dinilai telah divaksinasi. Di Papua, alasan utama anak-anak yang melewatkan vaksinasi antara lain anak/pengasuh sedang bepergian, kurangnya informasi tentang kampanye dan tentang lokasi titik vaksinasi



Ringkasan Surveilans

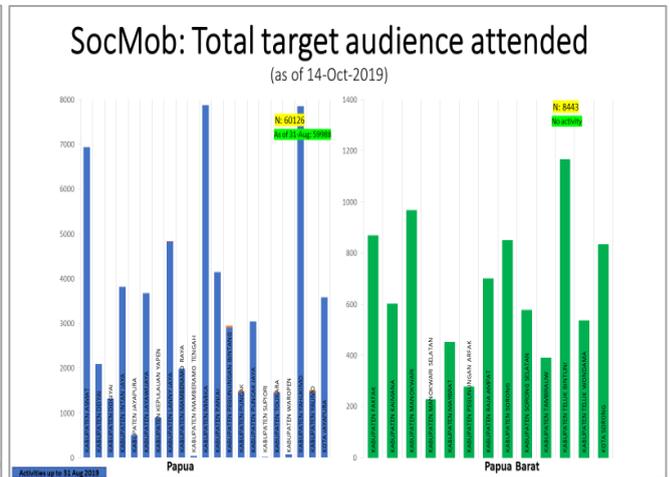
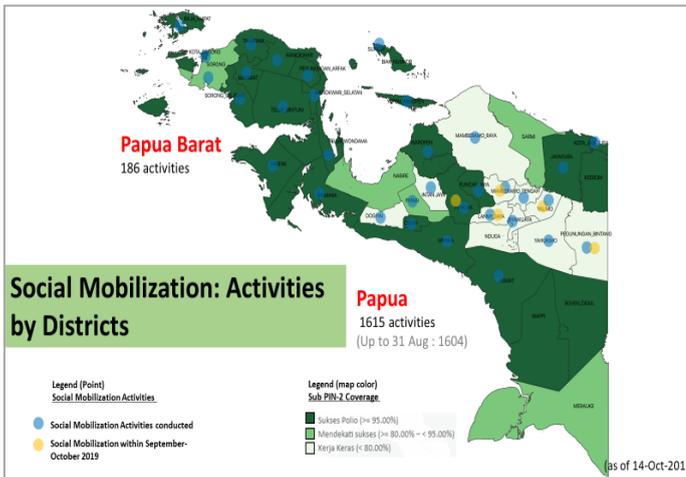
- Pada tahun 2018, Non Polio Acute Faccid Paralysis (NP AFP) di Indonesia sebesar **2.42** dengan spesimen adekuat sebesar **78.4%**. Sembilan dari 34 provinsi memenuhi kedua indikator utama surveilans AFP: >2 atau lebih kasus AFP non-polio per 100.000 anak di bawah usia 15 tahun dan >**80** persen kasus AFP dengan spesimen yang adekuat.
- Pada minggu ke-41 2019, NP AFP tahunan Indonesia adalah **1.61** dengan spesimen adekuat sebesar **79.4%**.
- Pada minggu ke-41 2019, provinsi Papua memiliki tingkat NP AFP tahunan sebesar **4.28** dengan spesimen adekuat sebesar **51.1%**, dengan 22 kasus AFP masih dalam klasifikasi pending. Papua Barat memiliki tingkat NP AFP tahunan sebesar **7.11**, spesimen adekuat sebesar **56.3** dengan 4 kasus AFP masih dalam klasifikasi pending.
- Komite Ahli Indonesia merencanakan pertemuan ad-hoc, untuk meninjau sisa kasus AFP tahun 2019 yang masih dalam klasifikasi pending di Papua dan Papua Barat.
- Surveilans aktif dan pelaporan kasus AFP terus meningkat di kedua provinsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, di kedua provinsi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal pelaporan dan investigasi kasus yang tepat waktu. Peningkatan pengumpulan spesimen yang tepat waktu dan memadai adalah prioritas bagi kedua provinsi.
- Ulasan Rekam Medis Rumah Sakit (HRR) di 12 provinsi berisiko tinggi terus berlanjut. Rumah sakit yang telah dilakukan HRR di Papua adalah 35/35 dan di Papua Barat adalah 19/19.
- Pengambilan sampel surveilans lingkungan (ES) di tahun 2019, di Papua telah diambil 19 sampel dari 8 lokasi berbeda di 3 kabupaten yaitu Kota Jayapura, Jayapura dan Yahukimo. Hasil pengujian menunjukkan negatif untuk 17 sampel dan 2 lainnya masih dalam proses. Sedangkan di Papua Barat telah diambil 2 sampel dari Manokwari yang hasilnya masih dalam proses.



Kiri: Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan (Dr. R. Vensya Sitohang) memberikan presentasi tentang transmisi cVDPV2 di Filipina pada pelatihan surveilans AFP. Kanan: Staf beserta Kepala Imunisasi dan Surveilans DKK Fakfak mengunjungi bangsal anak di RSUD Fakfak untuk meninjau buku register sebagai upaya menemukan kasus AFP dan meningkatkan kepekaan staf rumah sakit.

Komunikasi dan Sosial Mobilisasi

- Sampai dengan 14 Oktober 2019, 1,615 kegiatan sosial mobilisasi telah dilaksanakan di Papua dan 186 telah dilaksanakan di Papua Barat dengan menjangkau sekitar 68,569 orang.
- Setelah serangkaian demonstrasi di Provinsi Papua dalam sebulan terakhir, Mitra Pelaksana UNICEF (GAPAI dan YP2KP) telah melanjutkan sosial mobilisasi. Internet sekarang dapat digunakan sehingga diseminasi informasi melalui media sosial menjadi kembali normal. Kerusuhan terakhir di kota dataran tinggi Wamena memiliki dampak serius terhadap kegiatan sosial mobilisasi dan vaksinasi di wilayah tersebut dan area lain yang perlu diakses melalui Jayawijaya (Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo dan Mamberamo Tengah). Rasa takut juga dirasakan oleh daerah lain di dataran tinggi sehingga menghambat kegiatan vaksinasi.
- UNICEF berhasil mengadvokasi istri Bupati Nabire saat pameran kerajinan tangan perempuan pada tanggal 16 Oktober 2019 untuk menyediakan dukungan pelaksanaan Sub PIN Polio. Ia menyatakan dukungannya dan membicarakan respons polio saat diskusi interaktif melalui radio lokal.
- Pada 8 Oktober 2019, DKP Papua dan UNICEF menginisiasi pertemuan dengan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten di Kabupaten Nduga yang selama ini tidak dapat dicapai untuk respons polio akibat ketidakstabilan politik. Tujuannya adalah mendiskusikan rencana pelaksanaan program "Puskesmas Udara" menggunakan dana nasional (BOK). Tim yang terdiri dari dokter, perawat, bidan dan ahli gizi akan dikirim ke area terpilih untuk menyediakan layanan kesehatan terpadu termasuk vaksinasi polio. Kader Gereja juga akan terlibat dalam memberikan layanan kesehatan dan memfasilitasi mobilisasi sosial. UNICEF akan melaksanakan pelatihan berjenjang untuk para kader dan pegawai puskesmas utama dalam beberapa minggu.



Kiri: Ibu Maryamah (gaun merah) dan Ibu Bupati Nabire (gaun putih) mendiskusikan dukungan respons Polio selama pameran kerajinan tangan perempuan di Nabire. Kredit: Maryamah / YP2KP. Kanan atas: Tim penempatan Folmimpi dan Nisikni di Kabupaten Yahukimo. Kredit: Wahidin / UNICEF. Kanan bawah: Petugas kesehatan menjelaskan tentang Polio dan pentingnya vaksinasi Polio di Desa Lumo dan Keliloma di Puncak Jaya. Kredit: Christian / GAPAI.

Mobilisasi Dukungan yang Optimal

Kementerian Kesehatan

- Kementerian Kesehatan Indonesia terus mengirim pakar senior ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendukung perencanaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi kegiatan respons polio.
- Telah dikeluarkannya surat edaran mengenai prosedur imunisasi IPV pada anak usia 4-36 bulan yang belum pernah mendapatkan imunisasi IPV serta cara pencatatan dan pelaporan.
- Telah dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen mengenai transmisi cVDPV di Filipina telah dikirimkan ke seluruh provinsi pada September 2019.

WHO

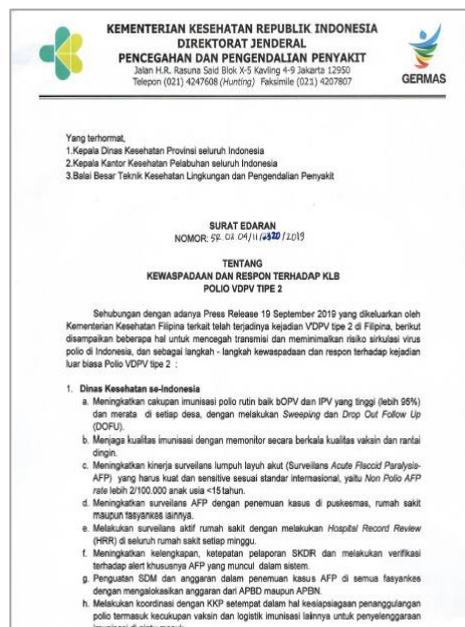
- WHO telah membuka kantor cabang di Jayapura, Provinsi Papua dan merekrut 10 petugas nasional untuk mendukung kegiatan di Papua dan Papua Barat. Para Petugas tersebut ditempatkan ke daerah dengan risiko tinggi untuk bekerja secara langsung dengan dinas kesehatan kota/kabupaten.
- Dikarenakan isu keamanan di Papua dan transmisi cVDPV2 yang baru-baru ini terjadi di Filipina, 3 petugas nasional telah ditempatkan ulang ke provinsi yang berbatasan dengan Filipina: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Selain itu, dua petugas nasional juga ditempatkan ulang ke Manokwari, Papua Barat dan Merauke, Papua untuk meningkatkan surveilans AFP dan cakupan IPV/OPV.
- Dua tambahan asisten data telah bergabung bersama tim Polio WHO, salah satunya ditempatkan di Jayapura sementara yang lainnya di Jakarta agar dapat menguatkan analisis data dan pembuatan keputusan berbasis bukti.
- Dua staf WHO HQ telah mengunjungi Indonesia, 1 staf melakukan penilaian ulang surveilans lingkungan (ES) dan lainnya meninjau tahap 1 dokumentasi OBRA.

UNICEF

UNICEF melalui GAPAI dan YP2KP merekrut 22 petugas lapangan yang telah ditempatkan di 12 daerah dataran tinggi di Papua. Petugas lapangan ini akan bertanggung jawab membantu daerah untuk mencapai cakupan 95%, mengembangkan strategi social mobilisasi yang sesuai dengan konteks lokal, meningkatkan keefektifan manajemen vaksin dan rantai dingin, serta melaksanakan RCA.

Lain-Lain

- Rotary terus menyediakan kaos, topi, pin, buku, dan bahan KIE lainnya ke banyak kabupaten di provinsi Papua. Mereka juga akan melaksanakan kampanye Hari Polio Sedunia dengan mengadakan diskusi Eradikasi Polio & Info Terkini secara Global serta jalan sehat di acara *car free day*.
- Relawan Palang Merah Indonesia telah memberikan dukungan untuk kegiatan tanggap KLB di Jayapura baik sebagai pemberi vaksin dan penggerak masyarakat.
- Kantor CDC Indonesia telah memperkuat dukungan mereka untuk operasi penanggulangan KLB melalui Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Sembilan titik fokus kota/kabupaten sekarang sudah tersedia dan telah secara aktif mendukung HRR dan Penilaian Kesiapan Sederhana. Satu konsultan internasional CDC saat ini berada di Jakarta untuk mendukung respons KLB.



Kiri: Spanduk polio telah terpasang di 3 lokasi yaitu Puskesmas Koya Barat, Skow (area perbatasan dengan Papua Nugini) dan Yoka. Kanan: Surat edaran Dirjen mengenai transmisi cVDPV di Filipina yang baru-baru ini terjadi.

Koordinasi

- Kementerian Kesehatan terus memimpin dan mengoordinasikan dukungan pemerintah dan mitra untuk semua kegiatan penanggulangan KLB polio. Pertemuan mingguan di tingkat nasional dan provinsi membantu untuk mengoordinasikan kegiatan dan memantau pelaksanaan rencana tanggap polio di tingkat lokal.
- Perwakilan senior Menteri Kesehatan (Penasihat Menteri Kesehatan) telah ditunjuk untuk secara langsung mendukung KLB polio di Indonesia dan melakukan perjalanan mingguan ke Jayapura, Papua untuk membahas isu anggaran dan operasional.
- Berbagai upaya sedang berlangsung untuk memaksimalkan dukungan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri yang secara aktif bekerja untuk memastikan semua respon pemerintah terhadap KLB yang terjadi.
- Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat (PHEOC) yang bertempat di Jayapura telah didirikan dan beroperasi penuh.
- Konferensi video bersama WHO/UNICEF antara tim nasional dan provinsi dari Papua dan Papua Barat terus diadakan setiap minggu.
- Pertemuan mitra Polio, yang dipimpin oleh WHO, dilakukan setiap 2 minggu. Terakhir adalah pertemuan ke-27 pada 10 Oktober 2019.
- Rotary International dan IFRC/PMI terus memberikan dukungan yang berharga dalam memobilisasi komunitas lokal yang bekerja sama dengan LSM lokal dan kelompok gereja untuk menyadarkan dan membangun permintaan untuk vaksinasi polio

Langkah Selanjutnya

- Kemenkes dan DKP Papua dengan dukungan Mitra akan meningkatkan pemantauan perkembangan cakupan Putaran 2 dan indikator Surveillance AFP.
- Pot spesimen, poster AFP, dan folder advokasi polio telah didistribusikan ke semua kabupaten di Papua/Papua Barat dan juga ke semua provinsi berisiko tinggi di Indonesia.
- Pedoman pengawasan AFP sedang direvisi oleh Kemenkes.
- Rotary akan melaksanakan kampanye Hari Polio Sedunia dengan mengadakan diskusi Eradikasi Polio & Info Terkini secara Global serta jalan sehat di acara *car free day* pada tanggal 27 Oktober 2019 di Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Kementerian Kesehatan Indonesia

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan. Email: poskoklb@yahoo.com
+62 877 7759 1097

#PHEOCIndonesia
+62878 0678 3906

WHO Indonesia

Dr Vinod Bura, Global Polio Eradication Coordinator. Email: burav@who.int
+62 812 8118 7429

UNICEF Indonesia

Dr Paul Pronyk, Chief, Child Survival & Development. Email: ppronyk@unicef.org



Kanan: Vaksinasi dilakukan oleh KKP Makassar bagi wisatawan yang pergi ke atau tiba dari Filipina. Kredit : Yuniarti/WHO Indonesia. Kanan: Kampanye Hari Polio Sedunia yang akan dilaksanakan oleh Rotary.